



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUKINO
2. Jabatan : KEPALA SUBAUDITORAT
3. NHK : 206099

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 715.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. Tanah Seluas 75 m² di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 50000 m² di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 250.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS 1.5 R A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOTOR, HONDA H1802N42LO A/T/OLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 1/T/SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 27.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 86.271.381

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.078.271.381

III. HUTANG

Rp. 57.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.021.271.381



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.